Kegiatan *Illegal logging* atau pembalakan illegal/liar merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang- undangan yang telah berlangsung sejak lama di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu kejahatan yang sulit diberantas, sebagaimana kita ketahui bahwa hutan yang berfungsi sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan, keadaannya sekarang cenderung menurun kelestariannya. Oleh karena itu pemerintah baik pusat maupun daerah berusaha mengadakan peraturan – peraturan hukum terhadap tindak pidana *Illegal logging* yang dilakukan oleh orang- orang yang tidak bertanggung jawab, untuk itu diperlukan adanya pengawasan hutan secara terpadu dan berkesinambungan sehingga dapat memininalkan kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Dalam skripsi ini penulis mengangkat persoalan bagaimana peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana *Illegal logging*, apa-apa saja yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam usaha pemberantasan tindak pidana *Illegal logging*, dan upaya-upaya yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk pemberantasan tindak pidana *Illegal logging* di Provinsi Sumatera Utara.

Penelilian ini dilakukan dengan cara peneliti langsung kelapangan dengan studi kepustakaan, yaitu dcngan melakukan pcnelusuran terbadap buku – buku, literatur – literatur yang berkaitan dengan tindak pidana *Illegal logging* dan juga melakukan wawaneara secara langsung dengan pihak- pihak yang terkait, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dengan menggunakan data – data yang ada diuraikan hasil – hasil penelitian melalui data primer dan data sekunder yang kemudian diseleksi serta dianalisa, sedangkan data yang diperoleh dilapangan diolah sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dibahas yaitu penanganan tindak pidana *Illegal logging* yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penanganan tindak pidana kehutanan secara urnum adalah lemahnya koordinasi antar penegak hukurn. pelaku utama (*actor intelektual*) yang sulit ditembus oleh hukum, adanya otonomi daerah, kurangnya sarana dan prasarana, dan keterbatasan dana.

Penanggulangan tindak pidana *Illegal logging* dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan maka harus dilakukan peningkatan pemberantasan tindak pidana *Illegal logging*, mempersiapkan aparatur penegak hukum baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memberlakukan peraturan – peraturan dan ketentuan tentang kehutanan dengan sebaik-baiknya guna meminimalkan ketentuan sekecil mungkin tindak pidana *Illegal logging* tersebut diseluruh Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

